Formulasi dan Landasan Legalitas Teori *Ḥājah* dalam Hukum Islam Perspektif Aḥmad Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Rashīd

Aspandi¹, Muawanah²

¹ Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

² Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

¹aspandimukardi@gmail.com, ²anadarto54@gmail.com

Abstract

The formulation of the theory of *ḥājah* in Islamic law has basically gained a place as a methodology in the study of Islamic law. However, this theory of *ḥājah* has not received much response from Muslim thinkers and some are still questioning its legality basis. Specifically, through a library research, this research outlines the formulation of Muslim thinkers' perspectives and its legality basis. With a philosophical approach to the proposal of *al-fiqh*, this study describes the ideas, terminology, formulation and legality of *ḥājah* as one of the methodologies in Islamic law. This research yielded findings; Hujjahan *ḥājah* as the basis for the application of Islamic law relies on the sources and general arguments of the verses that show difficulties for everyone and beyond the capacity of the conditions in general. The formulation of *ḥājah* in the perspective of Aḥmad Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Rashīd has various types based on their classification. The variety of *ḥājah* formulations is because *ḥājah* is not only one kind.

Keywords: *Ḥājah, Ḥājah Formulation, Legality of Ḥājah*

Abstrak

Formulasi teori *ḥājah* dalam hukum Islam pada dasarnya telah mendapatkan tempat sebagai salah satu metodologi dalam studi hukum Islam. Namun demikian, teori *ḥājah* ini tidak banyak mendapatkan respons dari para pemikir muslim dan sebagian masih mempertanyakan tentang landasan legalitasnya. Secara khusus, melalui *library research*, riset ini menguraikan formulasi *ḥājah* perspektif pemikir muslim dan landasan legalitasnya. Dengan pendekatan filosofis *uṣūl al-fiqh*, penelitian ini menguraikan gagasan, terminologi, formulasi dan landasan legalitas *ḥājah* sebagai salah satu metodologi dalam hukum Islam. Hasilnya menyatakan bahwa kehujjahan *ḥājah* sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam disandarkan kepada sumber dan dalil umum ayat-ayat yang menunjukkan adanya kesulitan bagi setiap orang dan diluar kemampuan kondisi pada umumnya. Formulasi *ḥājah* dalam perspektif Aḥmad Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Rashīd memiliki beragam jenis berdasarkan klasifikasinya. Beragamnya formulasi *ḥājah* tersebut dikarenakan *ḥājah* tidak hanya satu macam saja.

Kata Kunci: *Ḥājah, Formulasi Ḥājah, Legalitas Ḥājah*

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki karakteristik yang dinamis dan menempati posisi sentral serta menjadi basis utama dalam pengembangan legislatif dan orientasi yuridis.¹ Namun demikian, hukum Islam juga dapat mengalami perubahan berdasarkan dinamika seiring

¹ Abdullah, "The Legal Impact of Islamic Law in the Identity and Provisions of Qatari Legal System: Conceptual Frame and Legislative Directions," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2020): 451–82, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.451-482>.

dengan dialektikanya dengan faktor-faktor yang ada di sekitarnya.² Salah satu faktor yang mampu berdialog dengan hukum Islam adalah kondisi masyarakat di mana hukum itu berkembang.³ Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap muslim diberbagai tempat telah menjadi bagian dari lahirnya gagasan-gagasan terkait teori *ḥājah* (kebutuhan).

Gagasan dan formulasi *ḥājah* telah menjadi salah satu teori dalam studi hukum Islam. Dalam diskursus hukum Islam, formulasi teori *ḥājah* pada dasarnya telah mendapatkan tempat sebagai salah satu metodologi dalam studi hukum Islam. Namun demikian, metodologi teori *ḥājah* ini tidak banyak mendapatkan respon dari para pemikir muslim dan masih dipertanyakan landasan legalitasnya oleh Sebagian kalangan. Para pemikir muslim klasik pada dasarnya telah menguraikan gagasan dan konsepsi *ḥājah*. Namun, konsepsi tersebut masih bersifat normatif dan belum memberikan gambaran secara jelas secara metodologis. Para pemikir muslim klasik juga pada umumnya memiliki berbagai rumusan dan formulasi *ḥājah*. Namun demikian, formulasi tersebut masih bersifat umum dan juga belum terklasifikasi sesuai dengan aspek-aspek kandungannya. Dalam berbagai literatur karya pemikir klasik, legalitas *ḥājah* sebagai salah satu rumusan teori dalam studi hukum Islam juga masih menyisakan perbedaan pandangan. Hal itu dikarenakan secara eksplisit tidak ditemukan landasan baik dari nash al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan terminologi *ḥājah* sebagai salah satu dasar dalam studi hukum Islam.

Penelitian secara umum yang mengkaji terkait *ḥājah* dan hukum Islam telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Imam Mustofa dalam risetnya mengkaji tentang “Penggunaan Kaidah *Al-Ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia”. Dalam hasil risetnya menyatakan bahwa penggunaan kaidah *Al-Ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* oleh DSN-MUI sebagai dasar penetapan hukum dalam fatwa terkait produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tepat dan dapat menjawab problem hukum ekonomi di Indonesia.⁴ Secara eksplisit, penelitian tersebut

² Asmawi, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.

³ Ellya Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013): 99–118, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.

⁴ Imam Mustofa, “Penggunaan Kaidah *Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018): 1–26.

tidak menguraikan landasan legalitas dan formulasi *ḥājah* yang dapat digunakan sebagai salah satu metodologi dalam studi hukum Islam.

Penelitian tentang *ḥājah* juga banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, tetapi kajian *ḥājah* tersebut lebih banyak merujuk kepada *ḥājah* yang merupakan bagian dari nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Syufa'at.⁵ Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Jihan Eka Mufidah dan lainnya. Dalam riset yang berjudul "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al-Ghazali terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa", secara teoretis penelitian tersebut menguraikan konsep dan teori konsumsi perspektif Al-Ghazali yang digunakan sebagai pendekatan. Dalam riset tersebut dipaparkan bahwa teori konsumsi Al-Ghazali meliputi *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Riset tersebut hanya menyebutkan makna terminologi *ḥājah* secara singkat.⁶ Secara teoretis dan konseptual, penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan tentang terminologi *ḥājah* secara komprehensif, landasan dan formulasinya.

Penelitian secara khusus yang menguraikan tentang formulasi dan landasan legalitas *ḥājah* sebagai metodologi dalam studi hukum Islam tidak banyak mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Hal itu dapat dilihat dari minimnya hasil riset terkait topik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara khusus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang menguraikan gagasan dan konsep *ḥājah* dalam hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini menguraikan terminologi, landasan legalitas *ḥājah* dan formulasi *ḥājah* dalam perspektif pemikir muslim baik klasik maupun kontemporer.

Metode

Berdasarkan fokus penelitian yang menarasikan formulasi *ḥājah* dalam perspektif pemikir muslim dan landasan legalitasnya, riset ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode normatif melalui kajian pustaka (*library research*), riset ini menguraikan gagasan terkait terminologi *ḥājah* dalam hukum Islam serta formulasi dan landasan legalitasnya perspektif pemikir muslim. Data kualitatif terkait gagasan, formulasi *ḥājah* dan landasan legalitasnya dalam hukum Islam didapatkan dari berbagai karya para pemikir muslim baik tradisional maupun kontemporer. Salah satu sumber yang digunakan dalam riset ini yaitu gagasan dan formulasi Ahmad Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn

⁵ Syufa'at, "Implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam," *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2013): 143–66.

⁶ Jihan Eka Mufidah, "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa," dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 5, 2, 2019, 420–27.

Nāṣir al-Rashīd dalam karyanya *Al-Ḥājatū wa Atharūha fī al-Aḥkāmī; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyah*, Aḥmad Kāfi dalam karyanya *Al-Ḥājah al-Shar'iyah Hudūduha wa Qawā'iduha* dan beberapa tokoh pemikir lainnya. Selain itu, karya-karya pemikir muslim klasik yang menguraikan *ḥājah* dan implikasinya dalam hukum Islam juga menjadi sumber lain dalam riset ini. Hasil riset dalam berbagai artikel, jurnal ilmiah juga menjadi bagian dari sumber pelengkap dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pijakan Dasar dan Landasan Legalitas Ḥājah dalam Hukum Islam

Secara umum kehujjahan *ḥājah* sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam berpijak pada sumber utama ayat-ayat al-Qur'an. Namun demikian, ayat-ayat tersebut secara eksplisit tidak mengandung lafaz *ḥājah*. Oleh karena itu, kehujjahan *ḥājah* disandarkan kepada sumber dan dalil umum ayat-ayat yang menunjukkan adanya kesulitan bagi setiap orang dan diluar kemampuan kondisi pada umumnya. Ayat-ayat tersebut terkait erat dengan beberapa sifat dan hukum seperti *ḍarūrah*, menghilangkan kesulitan, dan *maṣlahah*. Ayat-ayat tersebut meliputi;

Pertama, ayat yang menunjukkan *ḍarūrah*, seperti; Al Quran surat Al Baqarah ayat 173, Al Quran surat Al Maidah ayat 3, Al Quran surat Al An'am ayat 119 dan ayat 145, serta Al Quran surat An Nahl ayat 115. Ayat-ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang kebolehan sesuatu yang haram bagi seseorang dalam kondisi terpaksa, dan secara khusus juga menjelaskan tentang kebolehan mengkonsumsi sesuatu (makanan) yang dilarang. Secara eksplisit, ayat-ayat tersebut merupakan dalil kehujjahan bagi *ḍarūrah*. Namun demikian, ayat-ayat tersebut juga dapat menjadi dalil tentang kehujjahan *ḥājah*. Hal tersebut didasarkan kepada penjelasan para fuqaha yang menempatkan *ḍarūrah* dan *ḥājah* dalam satu makna. *Ḍarūrah* dan *ḥājah* merupakan dua kondisi yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu sebagaimana penjelasan beberapa fuqaha bahwasanya *muḥtaj* (orang yang membutuhkan) dapat juga berarti *muḍṭarra* (orang yang terpaksa). Oleh karena itu, ayat-ayat yang menunjukkan tentang kehujjahan *ḍarūrah* juga mencakup tentang kehujjahan *ḥājah*.⁷ Berdasarkan pandangan fuqaha tersebut, dengan demikian ayat-ayat *ḍarūrah* juga meliputi *ḥājah* di dalamnya.

⁷ Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islami Ahmad Ibn Taimiyah* (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2001), 64.

Kedua, Ayat yang menunjukkan tentang menghilangkan kesulitan. Secara umum, ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi kedalam dua jenis yaitu; 1). Ayat yang menunjukkan tentang penolakan terhadap kesulitan dalam seluruh aspek keagamaan (Al Quran surat Al Maidah ayat 6 dan Al Quran surat Al Haj ayat 78). Kedua ayat tersebut secara eksplisit memberikan penjelasan penolakan terhadap adanya kesulitan dalam seluruh aspek keagamaan secara umum. Ayat-ayat tersebut juga memberikan penjelasan bahwa dalam menjalankan syariat, setiap *mukallaf* diberi kemudahan sesuai dengan batas kemampuannya. 2) Ayat yang menunjukkan tentang penolakan kesulitan dalam kondisi tertentu dan bagi kelompok khusus. Beberapa ayat tersebut meliputi; Al Quran surat al-Taubah ayat 91, dan Al Quran surat an-Nur ayat 61.

Ayat-ayat yang menunjukkan tentang penolakan adanya kesulitan baik secara umum maupun khusus, merupakan dalil kehujjahan *ḥājah*. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwasanya *ḥājah* merupakan sebab adanya kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan menghilangkan sebabnya. Pandangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Al-Jaṣāṣ dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat al-Maidah ayat 6 tersebut.⁸

Ketiga, ayat tentang adanya kemudahan dan keringanan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya *sharī'ah al-Islāmiyah* dibangun atas dasar dan prinsip mudah dan ringan bagi *mukallaf* dalam aspek hukum, aqidah, dan akhlaq. Ayat-ayat tersebut diantaranya; Al Quran surat al-Baqarah ayat 185 dan 286, dan Al Quran surat al-Nisa' ayat 28.

Ayat-ayat tersebut diatas memberikan penjelasan bahwasanya syariat menghendaki adanya kemudahan dan keringanan bagi *mukallaf* yang meliputi aspek pemenuhan *ḥājah*. Pengabaian terhadap *ḥājah* dapat menimbulkan kesulitan. Sementara itu, adanya kesulitan tersebut juga berlawanan dengan maksud dan prinsip dasar syariat yang memberi kemudahan dan keringanan.

Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, *hujjah ḥājah* sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam juga didasarkan pada beberapa hadis Nabi saw. Hadis yang bersifat umum maupun khusus menunjukkan tentang prinsip toleransi dan kemudahan dalam agama, penolakan terhadap kesulitan, dan perintah Nabi tentang keringanan. Hadis-hadis tersebut di antaranya: Hadis riwayat Bukhari Nomor 39, 90, dan

⁸ Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jasas, *Ahkam al-Quran*, Jilid II, t.t., 550.

4341. Selain didasarkan pada dalil *naqli*, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw, *hujjah ḥājah* juga didasarkan pada dalil *'aqli*.

Formulasi *Ḥājah* Perspektif Aḥmad Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Rashīd

Pengetahuan terhadap macam-macam *ḥājah* merupakan hal yang sangat penting. Hal itu disebabkan *ḥājah* tidak hanya satu jenis atau satu macam saja. Sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam, macam-macam *ḥājah* tersebut penting untuk diketahui dari setiap aspek dan muatannya. Hal itu dikarenakan pemberlakuan hukum dalam kondisi *ḥājah* juga dapat berbeda-beda berdasarkan perbedaan macam-macamnya tersebut. Jenis dan macam-macam *ḥājah* dapat diklasifikasi ke dalam beberapa macam berdasarkan aspek yang berbeda-beda. Klasifikasi jenis dan macam-macam *ḥājah* tersebut sebagaimana dilakukan oleh pemikir muslim Aḥmad Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Rashīd. Dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Ḥājatu wa Atharuha fi al-Aḥkāmī*, Ibn Nasiru al-Rashid mengklasifikasi *ḥājah* dengan berbagai formulasi sebagaimana berikut:⁹

1) *Ḥājah* Berdasarkan Aspek Umum dan Tidaknya

Berdasarkan aspek umum dan tidaknya, *ḥājah* dikelompokkan menjadi dua macam.¹⁰ *Pertama*, *al-Ḥājah al-'ammah* yaitu “sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, untuk memenuhi kemaslahatan secara umum, meliputi pertanian, industri, perdagangan, politik yang adil, dan peraturan yang baik”. Sifat umum dalam *al-ḥājah al-'ammah* ini tidak hanya terbatas pada terpenuhinya hak bagi setiap individu, akan tetapi pemenuhan *ḥājah* dalam hal ini tersebar ditengah masyarakat, tidak terbatas pada kelompok, golongan, individu tertentu, dan tidak terbatas pula pada tempat tertentu. Penjelasan arti umum tersebut sejalan dengan makna dan sifat *'ammah* yang memiliki arti menyeluruh dan banyak terjadi, dan hal itu sejalan dengan pandangan para ahli bahasa.¹¹

Selain istilah *al-ḥājah al-'ammah*, dalam beberapa literatur juga ditemukan beberapa istilah lain yang memiliki makna senada. Istilah tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menunjukkan makna dan maksud *al-ḥājah al-'ammah*. Beberapa istilah tersebut meliputi: *Pertma*, *Ḥājah al-Jinsī*, istilah ini dikemukakan oleh Imam al-

⁹ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 102–201.

¹⁰ al-Rashid, 102–18.

¹¹ A.I.F. al-Qazwīnī dan A.S.M. Harun, *Mu'jam maqayis al-lughah* (Dar al-Jil, 1999), 650, <https://books.google.co.id/books?id=zqVDAQAACAAJ>.

Haramain al-Juwayni untuk menyebut *al-ḥājah al-‘ammah*. Istilah tersebut digunakan oleh al-Juwayni untuk menunjuk seluruh *ḥājah al-ummah*. *Ḥājah* ini dapat mencapai tingkat *ḍarūrah* bagi individu maupun masyarakat secara umum seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya.¹² Di mana para fuqaha berpandangan bahwa tidak terpenuhinya *ḥājah al-jinsi* ini dapat menyebabkan hilangnya kemaslahatan umum.¹³

Kedua, *Maṣlaḥah al-‘Ammah*, istilah ini digunakan oleh ‘Izz Ibn ‘Abd al-Salām. Dalam pandangannya, jika sesuatu yang haram telah merata dan sulit menemukan yang halal, maka kondisi tersebut memperbolehkan menggunakan sesuatu yang haram sesuai dengan kebutuhan, dan tidak harus menunggu sampai tingkat *ḍarūrah*. Hal itu dikarenakan *Maṣlaḥah al-‘ammah* seperti *ḍarūrah al-khaṣṣah*.¹⁴ Penggunaan istilah *ḥājah al-‘ammah* dengan *Maṣlaḥah al-‘ammah* merupakan bagian dari mensifati *ḥājah* dengan *maṣlaḥah*. Hal itu disandarkan kepada pandangan bahwasanya pemenuhan kebutuhan umum manusia mencakup kemaslahatan didalamnya. Hal tersebut telah dikenal dikalangan para ahli. Beberapa ahli menyebut *ḥājī* dengan *maṣlaḥī*, seperti Al-Asfahāni. Dalam karyanya ia berkata “*al-Maṣlaḥī* mengandung proteksi terhadap beberapa maksud diantaranya dalam kondisi *ḥājah*”.¹⁵

Ketiga, *Rukḥṣah al-‘Ammah*, istilah ini umum digunakan oleh beberapa fuqaha Hanabalah. Beberapa fuqaha tersebut menggunakan istilah *rukḥṣah al-‘ammah* dalam pembahasan masalah jamak shalat karena hujan. Para fuqaha tersebut menetapkan bahwasanya dalam kondisi hujan, seseorang diperbolehkan menjamak shalat, meskipun jalan menuju masjid tersebut beratap.¹⁶ Di antara fuqaha yang menggunakan istilah tersebut adalah Al-Bahuti. Istilah *rukḥṣah al-‘ammah* digunakan oleh Al-Baḥūṭi untuk menunjuk *ḥājah al-‘ammah*. Hal itu dikarenakan dalam pandangannya, bahwa diperbolehkannya jamak dua shalat dalam kondisi hujan karena didalamnya terdapat *mashaqqah* (kesulitan) dalam jumlah, bukan *mashaqqah* yang dialami oleh setiap individu. Oleh karenanya pemenuhan *rukḥṣah al-‘ammah* dalam kondisi hujan tersebut meliputi wujudnya *mashaqqah* maupun tidak sebagaimana dalam *saḥar*,¹⁷ yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan umum.

¹² Imam al-Haramain al-Juwayni, *Al-Burhanu fi Usul al-Fiqh*, t.t., 605.

¹³ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawa'id al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 180.

¹⁴ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, 313–14.

¹⁵ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyah*, 105.

¹⁶ al-Rashid, 105.

¹⁷ Mansur Ibn Yunus al-Bahuti, *Kashaf al-Qana'i 'An Matan al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), 7.

Keempat, *Hājah al-‘Uṣūliyyah*, istilah ini dikemukakan oleh ‘Abdullah Ibn Bayyah.¹⁸ Penggunaan istilah tersebut dinisbatkan kepada penggunaan para ahli *uṣūl*. Istilah tersebut digunakan dalam pembahasan khusus tentang *maqāṣid al-Shāri’ah*, yaitu bagian dari macam-macam *maqāṣid* yang meliputi; *darūriyyah*, *hājīyah* dan *taḥṣīnī*.¹⁹ Jika merujuk kepada penggunaan para ahli *uṣūl* tersebut, maka penggunaan istilah *hājah al-‘uṣūliyyah* yang dimaksudkan adalah *hājah al-‘ammah*.²⁰

Sebagaimana tidak dikhususkan kepada individu dan kelompok tertentu, *hājah al-‘ammah* juga tidak dikhususkan untuk seseorang yang dalam kondisi *hājah* saja, akan tetapi juga diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi normal. Selain itu, *hājah al-‘ammah* berimplikasi hukum secara kontinu dan selamanya. Implikasi tersebut tidak bergantung kepada tetap atau hilangnya *hājah*. Sebagai contohnya, beberapa seperangkat akad (transaksi) yang dibolehkan sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah yang umum dan berlawanan dengan qiyas, tetapi transaksi tersebut dibutuhkan oleh manusia, seperti memesan barang (*salam*), sewa-menyewa, wasiat, *ju’alah*, dan sebagainya. Setiap orang diperbolehkan melakukan transaksi tersebut baik dalam kondisi *hājah* maupun tidak.²¹

Kedua, Hājah al-Khaṣṣah yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh sekelompok orang, seperti kebutuhan penduduk kota tertentu, atau sesuatu yang merupakan kebutuhan seseorang individu atau beberapa orang tertentu saja. Selain istilah tersebut, beberapa fuqaha juga menggunakan istilah lain. Ibn Bayyah misalnya menggunakan istilah *hājah al-Khaṣṣah* untuk menunjuk *hājah al-khaṣṣah*, dikarenakan keterkaitannya dengan seseorang. Selain itu, Ibn Bayyah juga menggunakan istilah *hājah al-fiqhiyyah*,²² hal itu dikarenakan salah satu syarat dibolehkannya hukum pengecualian yaitu adanya *hājah al-khaṣṣah*. Sebagai contohnya, dibolehkan melihat aurat wanita untuk tujuan pengobatan. Dibolehkan melihat wajah wanita dalam rangka muamalah, kesaksian, proses lamaran, pengajaran, dan lainnya sebab semua itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia. Akan tetapi, kebolehan tersebut dalam batas adanya kebutuhan saja.²³

¹⁸ ‘Abdullah Ibn al-Shaikh al-Mahfuz Ibn Bayyah, “Al-Farqu Baina al-Darurah wa al-Hajah Ma’a Ba’da al-Tatbiqiti al-Mu’asirati,” dalam *majalah Dirasat Iqtisadiyah Islamiyyah al-Ma’had al-Islami Lilbuhuth wa al-Tadrib al-Tabi’i Lilbunuk al-Islami Liltanmiyah*, 2000, 119.

¹⁹ Iffatin Nur, Syahrul Adam, dan M. Ngizzul Muttaqien, “Maqāṣ id Al-Sharī‘at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (30 Desember 2020): 331–60, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>.

²⁰ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 106.

²¹ al-Rashid, 111–12.

²² Bayyah, “Al-Farqu Baina al-Darurah wa al-Hajah Ma’a Ba’da al-Tatbiqiti al-Mu’asirati,” 129–30.

²³ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 113–14.

Hājah al-Khaṣṣah memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan *hājah al-‘ammah*. Implikasi hukum pengecualian dalam *hājah al-Khaṣṣah* hanya diperuntukan bagi orang yang menghadapi kondisi *hājah* (membutuhkan) bukan sebaliknya, yakni kondisi normal (tidak membutuhkan). Implikasi lainnya yaitu hukum dalam *hājah al-Khaṣṣah* bersifat sementara, implikasi hukum tersebut bergantung kepada tetap dan hilangnya *hājah*. Jika tidak terdapat *hājah* atau sudah tidak membutuhkan, maka hukum tersebut akan kembali kepada hukum asalnya.²⁴ Pandangan tersebut diperkuat oleh dalil kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “*mā jāza li’udrin baṭala bizawālihi*” yang berarti sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka menjadi batal dengan hilangnya uzur tersebut.²⁵ Kaidah tersebut bersifat umum mencakup setiap uzur syar’i, dan diantaranya adalah *hājah al-Khaṣṣah* yang memiliki implikasi hukum bersifat sementara dan bergantung dengan wujudnya *hājah* tersebut.

2) *Hājah* berdasarkan aspek terjadi dan tidaknya.

Dalam aspek ini, *hājah* dikelompokkan menjadi tiga macam.²⁶ Pertama, *al-hājah al-waqī’ah* yaitu kebutuhan yang telah nyata dalam realita. Kebutuhan ini menjadi penghalang bagi seseorang jika tidak terpenuhi, atau akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan baginya. Sebagai contohnya, kebutuhan tayammum bagi orang yang sakit atau kesulitan mencari air, melaksanakan tawaf dengan kursi dorong bagi orang yang membutuhkan, dan lainnya. Dalam aspek ini, tidak ada pilihan bagi seseorang kecuali harus memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu dikarenakan dalam *al-hājah al-waqī’ah* pilihannya hanya meliputi memenuhi kebutuhan tersebut, atau akan mendapatkan kesulitan dan bahaya jika mengabaikannya.

Kedua, *al-hājah al-mutawaqqi’ah* yaitu kebutuhan yang potensial. Kebutuhan ini bersifat prospektif, di mana wujud dan terjadinya hajat tersebut didasarkan pada adat kebiasaan, akibat dari sesuatu, atau akibat lain dari *al-hājah al-waqī’ah*.²⁷ *Hājah* ini juga dinilai sebagai *al-hājah al-shar’iyyah*. Sebagai contohnya, seseorang yang shalat dalam keadaan terluka di kakinya, dan jika melaksanakan shalat dengan berdiri akan membahayakannya, maka ia dibolehkan shalat dalam keadaan duduk. Hal itu dikarenakan kebutuhan duduk dalam shalat tersebut bersifat potensial. Dalam pandangan para fuqaha,

²⁴ al-Rashid, 115–17.

²⁵ Abu Fadh Jalaluddin ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, “Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Shafi’iyyah,” t.t., 61.

²⁶ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyah*, 128–33.

²⁷ al-Rashid, 129.

al-ḥājah al-mutawaqqi'ah ini juga dapat dijadikan dasar sebagaimana *al-ḥājah al-waqi'ah*. Hal itu sebagaimana pandangan al-Shatibi bahwa setiap *mashaqqah* dapat menjadi dasar hukum yang meliputi *mashaqqah mutawaqqi'ah*.²⁸

Ketiga, *al-ḥājah al-mutawaqqi'ah* yakni *ḥājah* yang belum terjadi dan tidak ditemukan keterangan atau sebab akan terjadinya *ḥājah* tersebut. Hajat ini hanya disandarkan kepada dugaan yang lemah.²⁹ Para fuqaha berpandangan bahwa *ḥājah* ini tidak dapat dijadikan dasar dalam hukum Islam, dikarenakan hanya bersifat dan disandarkan pada dugaan yang lemah. Pandangan tersebut didasarkan pada kaidah “*lā ‘Ibrah litawahhum*.”³⁰ Hukum jamak dan terbuka tersebut diperbolehkan manakala *safar* benar-benar dilakukan. Hal itu dikarenakan *ḥājah* tersebut bersifat *waqi'ah*. Akan tetapi, jika seseorang tersebut masih ragu akan pelaksanaan *safar*, maka tidak diperbolehkan menjamak dan terbuka sebelum *safar*. Hal itu dikarenakan *ḥājah* terbuka tersebut bersifat dugaan yang lemah.³¹

3) *Ḥājah* Berdasarkan Aspek Posisinya

Berdasarkan aspek posisinya, *ḥājah* dikelompokkan kedalam dua macam.³² Pertama, *al-ḥājah al-darūriyyah* yaitu sesuatu yang pada dasarnya menempati *ḥājah* dan berubah menempati posisi *darūrah*. *Ḥājah* ini menempati hukum sebagaimana *al-darūrah*, dikarenakan memiliki sifat *darūrah* seperti kuatnya tekanan, dan tingkat kebutuhannya yang sangat kuat. Penjelasan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Al-Zarkashi bahwa sesuatu yang bersifat *ḥāji* (kebutuhan) dapat juga menempati posisi *darūri* (darurat), seperti kebutuhan pendidikan untuk anak,³³ dan tawaf dalam keadaan Haid.³⁴ Penjelasan tersebut juga sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Kafi yang mengutip pernyataan Ibn ‘Ashur bahwa sesuatu yang bersifat *taḥsīnī* dapat berubah dan menempati *ḥāji*, demikian pula sesuatu yang bersifat *ḥāji* dapat berubah dan menempati posisi *darūri*.³⁵

Kedua, *al-ḥājah al-‘ādiyyah* yaitu kebutuhan yang terjadi sesuai dengan tempat dan posisinya. *Ḥājah* ini tidak dapat menempati *darūrah* dan hukumnya, dikarenakan tidak

²⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 114.

²⁹ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 132.

³⁰ al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 363.

³¹ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 132.

³² al-Rashid, 140–43.

³³ Abu' Abdullah Badaruddin Muhammad Ibn Baha'dir al-Zarkashi, *Al-Bahru al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, Jilid V (Kuwait: Dar al-Safwah, t.t.), 211.

³⁴ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*, 142.

³⁵ Ahmad Kafi, *Al-Hajah al-Shar'iyyah Hududuha wa Qawa'iduha*, t.t., 51.

memiliki sifat-sifat *ḍarūrah*. Beberapa contoh seperti, kebutuhan seseorang terhadap manfaat suatu barang, tidak diperbolehkan kecuali dengan izin pemiliknya.

4) *Al-Ḥājah* berdasarkan aspek tujuannya

Dalam aspek ini *ḥājah* dikategorikan ke dalam dua macam.³⁶ Pertama, *al-ḥājah al-aṣliyah* yaitu *ḥājah* yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang karena pentingnya hal tersebut dan berhubungan dengan kemaslahatan bagi kehidupannya. Dalam istilah lain, *ḥājah* ini disebut juga dengan *al-ḥājah al-maqṣid* yaitu kebutuhan yang tujuannya ditunjukkan kepada zat sesuatu itu. Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa *al-ḥājah al-aṣliyah* ini memiliki makna yang dekat dengan *ḍarūrah*. Dalam pengertian lain, *al-ḥājah al-aṣliyah* terkait erat dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Sebagai contohnya, kebutuhan kepada perkawinan, pakaian, dan lainnya.

Kedua, *al-ḥājah al-tab'iyah* atau disebut juga *al-ḥājah al-wasīlah*. Dalam istilah lain disebut juga *al-ḥājah al-zaidah* yang berarti kebutuhan yang dapat dihindari oleh setiap orang, dan masalah kehidupannya tetap terpenuhi tanpanya.³⁷ Dalam pengertian lain, kebutuhan ini memungkinkan bagi seseorang untuk menghindarinya. Sebagai contohnya kebutuhan *khiyār* dalam jual beli dan mahar *mitsli*. Kebutuhan *khiyār* tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari setiap perkara yang bertentangan dengan *maqāṣid al-shāri'ah*.

Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan waktu dan ilmu pengetahuan, kebutuhan seseorang juga ikut berkembang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Perkembangan kebutuhan tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai problematika *ḥājah* baru dalam hukum Islam. Oleh karenanya, perumusan definisi ulang makna *ḥājah* sangat relevan dilakukan. Berpijak pada rumusan para ahli *uṣūl* klasik maupun kontemporer, maka definisi *ḥājah* secara komprehensif dapat dirumuskan sebagaimana berikut yaitu “kebutuhan individu maupun umat kepada sesuatu untuk memberikan kelapangan, menghilangkan kesempitan dan kesusahan, yang bertentangan dengan dalil atau kaidah-kaidah umum syar'i”.

Secara umum landasan legalitas *ḥājah* sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam berpijak pada sumber utama dalil *naqli*, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Landasan legalitas *ḥājah* disandarkan kepada sumber dan dalil umum

³⁶ al-Rashid, *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyah*, 149–53.

³⁷ al-Rashid, 153.

ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan adanya kesulitan bagi setiap orang dan di luar kemampuan kondisi pada umumnya, dan juga didasarkan pada dalil 'aqli. Sementara itu, formulasi *ḥājah* dalam perspektif pemikir muslim memiliki ragam jenis. Hal itu dikarenakan kondisi *ḥājah* juga dapat berbeda-beda berdasarkan perbedaan aspek dan muatannya. Perbedaan tersebut melahirkan beragam formulasi *ḥājah* dengan klasifikasi yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Abadi, Mujiduddin Muhammad al-Fayruz. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Abdullah. "The Legal Impact of Islamic Law in the Identity and Provisions of Qatari Legal System: Conceptual Frame and Legislative Directions." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.451-482>.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Jilid II. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Al-Suyuti, Abu Fadl Jalaluddin 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr. "Al-Ashbah wa al-Nazair fi al Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah," t.t.
- Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.
- 'Atar, Hasan Ibn Muhammad Ibn Mahmud al-. *Hashiyah 'ala Sharhi al-Jalali al-Mahalli li Jam'i al-Jawami'i*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Azhari, Abi Mansur Muhammad Ibn Ahmad al-. *Tahdhib al-Lughah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Bahuti, Mansur Ibn Yunus al-. *Kashaf al-Qana'i 'An Matan al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Baqillani, Muhammad Ibn Tayyib Ibn Muhammad Ibn Ja'far Ibn al-Qasim al-. *Al-Tamhid*. Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1957.
- Bayyah, 'Abdullah Ibn al-Shaikh al-Mahfuz Ibn. "Al-Farqu Baina al-Darurah wa al-Hajah Ma'a Ba'da al-Tatbiqiti al-Mu'asirati." *dalam majalah Dirasat Iqtisadiyah Islamiyyah al-Ma'had al-Islami Lilbuhuth wa al-Tadrib al-Tabi'i Lilbunuk al-Islami Liltanmiyah*, 2000.
- Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-. *Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari*. Jilid I. Riyad: Dar al-Salam, 2000.
- Burnu, Muhammad Shiddiq ibn Ahmad al-. *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.

- Faris, Abu al-Husain Ibn Ahmad Ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1993.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Jasas, Abu Bakr Ahmad al-Razi al-. *Ahkam al-Quran*. Jilid II, t.t.
- Juwayni, Imam al-Haramain al-. *Al-Burhanu fi Usul al-Fiqh*, t.t.
- Kafi, Ahmad. *Al-Hajah al-Shar'iyyah Hududuha wa Qawa'iduha*, t.t.
- Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim al-. *Qawa'id al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn. , *Lisan al- 'Arabi*. Jilid II. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Mufidah, Jihan Eka. "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa." Dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5. 2, 2019.
- Mustofa, Imam. "Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018).
- Nur, Iffatin, Syahrul Adam, dan M. Ngizzul Muttaqien. "Maqāṣ id Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (30 Desember 2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>.
- Qazwīnī, A.I.F. al-, dan A.S.M. Harun. *Mu'jam maqayis al-lughah*. Dar al-Jil, 1999. <https://books.google.co.id/books?id=zqVDAQAACA AJ>.
- Rashid, Ahmad Ibn 'Abd al-Rahman Ibn Nasir al-. *Al-Hajatu wa Atharuha fi al-Ahkami; Dirasah Nazariyah wa Tatbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya, 2008.
- Rosana, Ellya. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.
- Sadlan, Shalih bin Ghanim al-. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: Dar Balansiyyah, t.t.
- Salam, Abu Muhammad 'Izzu al-Di n al Silmi Ibn 'Abd al-. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Jilid II. Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Syufa'at. "Implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam." *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2013).
- Taimiyah, Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islami Ahmad Ibn Taimiyah*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu. , *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Zarkashi, Abu' Abdullah Badaruddin Muhammad Ibn Bahadir al-. *Al-Bahru al-Muhit fi Usul al-Fiqh*. Jilid V. Kuwait: Dar al-Safwah, t.t.

- Zarkashi, Abu ‘Abdullah Badaruddin Muhammad Ibn Bahadir al-. *Al-Manthur fi al-Qawa'id*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Zarqa’, Ahmad Ibn Muhammad al-. *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.